

# Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Peningkatan Produksi  
Tanaman Pangan  
Harus Gunakan SRG**

**Revitalisasi  
PLKA Jateng**

**2015 BKDI  
Prioritaskan  
Kontrak Komoditi  
Karet & Tambang**



**Pokja SRG Rotan & Rumpun Laut**

# Sinkronisasi Kebijakan Implementasi SRG



Berita Utama.....	4-7
- Pokja SRG Rotan & Rumpun Laut Sinkronisasi Kebijakan Implementasi SRG	
Resi Gudang.....	8-9
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Harus Gunakan SRG	
Pasar Lelang.....	10-11
-Revitalisasi PLKA Jateng	
Berjangka.....	12-13
- 2015 BKDI Prioritaskan Kontrak Komoditi Karet & Tambang	
Agenda Foto.....	14-15
Aktualita.....	16-17
- 86 % Investor Ritel Forex Merugi - Bappebti, OJK dan BI Bahas Obligasi Negara Berjangka - Tim Formatur Siap Seleksi Pengurus AIPB - JFX Cabut Izin Dua Anggota Bursa	
Analisa.....	18
Breaking News.....	19
Info SRG.....	20-21

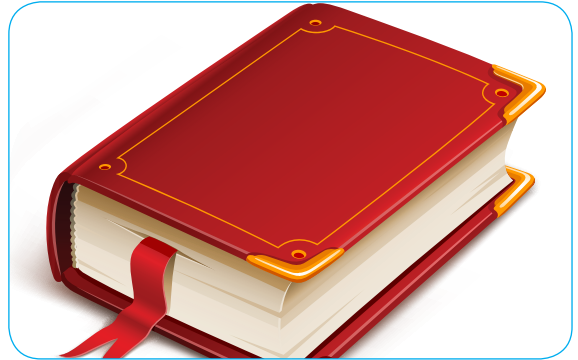
## Kiprah...26-27

Cintai PBK, Nyaman  
Bersama Keluarga



## Forum...22

Menanti 'Kelahiran' AIPB



## Kolom...23-25

Dibalik Turunya Harga  
Karet Dunia



## Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.





KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



**buletin**  
**Bappebti**  
BUKTIAN HARGA & PERDAGANGAN KOMODITI

#### Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan  
Berjangka Komoditi

**Penasihat/Penanggung Jawab**  
Sutriyono Edi

**Pemimpin Redaksi**  
Sri Nastiti Budiarti

**Wakil Pemimpin Redaksi**  
Taufik K.S

**Dewan Redaksi**  
Subagiyo, Saleh Abich, Himawan  
Purwadi, Yuli Edi Subagio, Annisa F.  
Wulandari, Poppy Juliyanti, Yovian Andri  
P., Tomi Setiawan

**Sirkulasi**  
Apriliyanto, Katimin, Gita Regina  
Napitupulu

**Alamat Redaksi**  
Gedung Bappebti  
Jl. Kramat Raya  
No. 172, Jakarta Pusat.

**www.bappebti.go.id**

*Redaksi menerima artikel ataupun opini  
dikirim lengkap dengan identitas serta foto  
ke E-mail:  
buletin@bappebti.go.id*



Foto : Kepala Bappebti, Sutriyono Edi mendampingi Mendag, Rachmat Gobel dan Menteri Koperasi, A.A Gede N. Puspayoga, saat melakukan kunjungan di gudang SRG, Pasar Induk Cipinang, Jakarta.

Revitalisasi Pasar Lelang Komoditi Agro-PLKA sejak dicanangkan tahun 2011, adalah pasar lelang yang diselenggarakan Dinas Perindag Jateng untuk pertama kalinya resmi dikelola lembaga koperasi. Resminya pada 27 November 2014, lalu, Kepala Bappebti menyerahkan perizinan kepada Koperasi Pasar Lelang Agro Jateng, sebagai pengelola dan penyelenggara PLKA Jateng.

Revitalisasi PLKA itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pasar lelang berjalan profesional dan mandiri, sehingga dalam penyelenggaraannya tidak bergantung dari pembiayaan baik APBN maupun APBD. Di sisi lain, Koperasi Pasar Lelang Agro Jateng sebagai institusi bisnis dapat mencari keuntungan di dalam menjalankan usahanya.

Hingga akhir tahun ini, Bappebti direncanakan secara berturut-turut akan memberikan izin revitalisasi PLKA ke empat pasar lelang, yakni PLKA Bali, Jabar, Jatim dan Sulsel.

Adapun di bidang Sistem Resi Gudang- SRG, pada Oktober dan November lalu, Bappebti juga merapatkan barisan Kelompok Kerja- Pokja SRG komoditi rotan dan rumput laut. Diharapkan dengan keterlibatan sejumlah instansi terkait akan mempercepat implementasi SRG rotan dan rumput laut di sentra-sentra produksi.

Dengan Pokja SRG tersebut, masing-masing lembaga atau instansi terkait dapat mengambil peran sesuai dengan Tupoksinya. Misalnya Kementerian Perindustrian untuk mengadakan pelatihan teknis tentang SRG rotan untuk peningkatan kualitas dan pengadaan alat terbaru untuk menggantikan peralatan yang sudah usang.

Sedangkan di bidang SRG rumput laut, Deputi Pangan dan Sumber Daya Hayati dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, merencanakan di tahun 2015 akan berkoordinasi

dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk pengembangan ekonomi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di mana sebagian besar masyarakatnya merupakan kelompok pembudidaya rumput laut. Dengan koordinasi tersebut, diharapkan pemberdayaan petani dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Di samping itu, dalam menjaga kesinambungan rumput laut dari sisi hulu dan hilir maka diperlukan juga roadmap komoditi rumput laut dan pemetaan wilayah pengembangan industri rumput.

Usulan menarik juga datang dari Kementerian Koperasi UKM, yang memberi saran agar dalam pengembangannya lembaga koperasi diberi kesempatan sebagai pengelola gudang SRG rumput laut.

Di samping laporan tersebut, Redaksi Buletin Bappebti juga menyajikan laporan hasil wawancara langsung dengan Dirut BKDI, Megain Widjaja. Dalam wawancara tersebut, terungkap BKDI di tahun 2015 merencanakan peluncuran kontrak berjangka komoditi karet dan komoditi tambang. BKDI memilih komoditi karet karena hingga saat ini belum ada acuan harga karet di dalam negeri sehingga berdampak rendahnya harga karet. Sedangkan komoditi tambang lainnya seperti nikel dan bauksit, diharapkan bisa mengikuti jejak komoditi timah.

Di samping itu, juga diutarakan Megain Widjaja, di tahun 2020 BKDI direncanakan sudah go-public di bursa saham. Dengan demikian sejumlah saham BKDI bisa dimiliki masyarakat Indonesia. Dengan go-public, BKDI diharapkan lebih fokus menjadi sarana pembentukan dan acuan harga komoditi di dalam negeri.

Salam!



## Pokja SRG Rotan & Rumput Laut Sinkronisasi Kebijakan Implementasi SRG

***Keterlibatan berbagai instansi dalam implementasi SRG komoditi rotan dan rumput laut, diharapkan efektif meningkatkan kinerja SRG serta memberi manfaat ganda bagi petani.***

Sistem Resi Gudang (SRG) sejak terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006, harus diakui belum optimal dimanfaatkan baik masyarakat petani maupun pelaku usaha. Padahal instrumen ini merupakan sarana tunda jual dan sarana pembiayaan perdagangan. Karena itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Tim Kelompok Kerja (Pokja) SRG secara intensif terus melakukan pertemuan untuk mensinergikan program dan kebijakan yang dimiliki kementerian atau lembaga terkait dalam mendukung pemanfaatan SRG.

Menurut Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Retno Rukmawati, mengatakan, pengembangan dan implementasi SRG komoditi rotan dan rumput laut menjadi salah satu pembahasan Tim Pokja SRG. Hingga kini, Tim Pokja telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali membahas komoditi rotan dan empat kali pertemuan untuk membahas komoditi rumput laut.

“Dari hasil pertemuan Tim Pokja SRG tersebut, akan dilaksanakan pilot project (proyek percontohan) SRG untuk rotan. Sedangkan untuk pengembangan SRG komoditi rumput laut akan dilakukan se-



cara berkesinambungan baik dari sisi hulu maupun hilir,” jelas Retno kepada Buletin Bappebti, baru-baru ini.

Secara rinci, Retno menjelaskan, pertemuan terakhir pembahasan SRG rotan telah dilaksanakan pada 24 Oktober 2014, lalu, di Jakarta. Acara itu dihadiri sejumlah instansi terkait komoditi rotan, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, PT Sucofindo, PT Bhandha Ghara Rekso, PT Pertani, Bank BRI, Bank BJB dan Asosiasi Meubel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI).

“Dalam pertemuan Pokja SRG itu, beberapa perwakilan dari masing-masing kementerian dan lembaga terkait memaparkan program dan kegiatan terkait pelaksanaan SRG untuk komoditi rotan,” terang Retno.

Apa saja poin pemaparannya? Perwakilan Ditjen Industri Agro, Kemenperin, memaparkan beberapa hal, diantaranya, Pertama, dalam meningkatkan nilai tambah komoditi rotan, Kemenperin secara berkelanjutan telah melakukan kegiatan pelatihan peningkatan SDM pelaku industri rotan dalam bidang teknik desain produksi untuk furnitur rotan dan pelatihan terkait bidang desain.

Kedua, Kemenperin bekerjasama dengan AMKRI dan LSM Pupuk melakukan perekrutan peserta dan mengundang instruktur tenaga ahli bidang desain dari beberapa institusi dalam rangka menambah wawasan pelaku industri rotan terkait desain dan teknik produksi.

Ketiga, terkait dengan bantuan alat, Kemenperin juga telah melakukan kunjungan ke UPT Rotan di Katingan. Kegiatan yang dilakukan adalah pemetaan terhadap beberapa bantuan alat yang telah diserahkan. Berdasarkan pemetaan tersebut, pada tahun 2015 Kemenperin telah menganggarkan peremajaan alat-alat pengolahan rotan.

Ke-empat, Kemenperin akan mengadakan pelatihan teknik produksi yang dilakukan di beberapa daerah, seperti Palu, Makassar, Katingan, dan Aceh. Sedangkan pelatihan terkait dengan desain



rotan, akan dilaksanakan di Cirebon, Sukoharjo, Jepara dan Surabaya.

Kelima, dalam meningkatkan penetrasi untuk produk-produk furnitur, Kemenperin akan memfasilitasi pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri. Enam, hingga saat ini Kemenperin belum memiliki gudang untuk komoditi rotan.

Adapun paparan dari perwakilan Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut, antara lain mengatakan, pertama, Kementerian Kehutanan fokus terhadap sisi hulu dari komoditi rotan, dengan tetap memperhatikan sisi hilir dari komoditi rotan. Kedua, terkait pemanfaatan SRG rotan, diharapkan adanya pemetaan masalah dari sisi hulu dan hilir, karena komoditi rotan merupakan salah satu hasil hutan non-kayu yang menjadi prioritas. Sebab itu diharapkan adanya kebijakan prioritas terkait rotan sehingga menjadi dorongan bagi pengembangan pelaku usaha baik dari sisi hulu maupun hilir.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam mendorong pembangunan sektor hulu dan hilir komoditi rotan.

Sedangkan perwakilan AMKRI menyampaikan, asosiasi ini telah melakukan kerjasama dengan Kemenperin dan Kemendag dalam kegiatan pameran terkait furniture rotan. AMKRI sangat mendukung kebijakan terkait pelarangan ekspor rotan mentah, karena dapat meningkatkan pertumbuhan industri rotan nasional dan pelaku usaha rotan.

Saat ini, AMKRI juga telah bekerjasama dengan PT. Sumber Sulawesi sebagai perusahaan penyuplai bahan baku dan beberapa institusi terkait pelatihan terkait desain rotan. Adapun perwakilan PT. Sucofindo, memaparkan, pihaknya telah memiliki data-data yang dimiliki terkait sumber-sumber asal rotan di hulu, yang dapat digunakan oleh Kemendag sebagai bahan rujukan untuk pilot project SRG rotan.

Sementara itu, perwakilan BRI melihat, perlunya pertimbangan terkait subsidi SRG untuk pelaku usaha rotan perorangan. Pasalnya, pelaku rotan lebih banyak pada perorangan dibandingkan dengan per kelompok.

Adapun perwakilan PT. Pertani, mengungkapkan, diperlukan adanya pema-





haman lebih lanjut bagi PT. Pertani terkait manajemen pergudangan untuk komoditi rotan. Hal itu karena PT. Pertani belum memiliki gambaran terkait manajemen pergudangan untuk komoditi rotan. Di sisi lain, perwakilan PT. BGR, mengatakan, dalam pelaksanaan pilot project untuk komoditi rotan, perlu mempertimbangkan penetapan standar mutu, aksesibilitas serta biaya transportasi rotan. Selain itu, diharapkan adanya pendampingan untuk pengelola gudang.

"Dari berbagai pandangan yang disampaikan instansi tersebut, Pokja SRG komoditi rotan akan melakukan beberapa langkah strategis," jelas Retno Rukmawati.

Lebih jauh dijelaskannya, Pokja SRG rotan akan melakukan pilot project rotan yang diharapkan dapat mendukung pengembangan komoditi rotan bagi kelompok tani yang berada di sisi hulu maupun hilir. Di samping itu, sebagai tahap pertama dalam pelaksanaan pilot project SRG rotan maka ditetapkan lokasi pilot project. Adapun lokasi yang dipilih untuk sentra hulu adalah daerah Bambi di Pidie.

"Pidie memiliki potensi yang besar untuk implementasi SRG komoditi rotan, sedangkan untuk sentra hilir adalah daerah Cirebon, karena daerah tersebut memiliki potensi yang besar untuk industri rotan," jelas Retno.

Selain itu, tambah Retno, Bappebti

akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan AMKRI guna membahas jenis rotan beserta speknya yang sesuai dengan kebutuhan industri rotan, khususnya untuk daerah Cirebon.

## SRG Rumput Laut

Pertemuan terakhir pembahasan SRG rumput laut telah dilaksanakan pada 10 November 2014, di Jakarta. Acara itu dihadiri Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI), PT. Pos Indonesia, Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Kospermindo), PT Sucofindo, PT Bhanda Ghara Reksa, PT Pertani, Bank Indonesia (BI), Bank BRI, Bank BJB, Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) dan para pelaku industri rumput laut.

"Tujuan dari pertemuan ke-empat Pokja SRG ini, yaitu membahas implementasi SRG untuk komoditi rumput laut, pemetaan kendala yang dihadapi petani dan pelaku usaha atau industri rumput laut selama ini, dan harapan solusi dari SRG serta langkah aksi yang perlu dilakukan setiap kementerian dan lembaga terkait guna mendukung pelaksanaan SRG rumput laut," terang Retno.

Dari pertemuan itu, ada beberapa masukan yang disampaikan instansi terkait, seperti Perwakilan Deputy Ekonomi dan Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan, dalam mendukung implementasi SRG, Deputy Ekonomi dan Keuangan Daerah memiliki program forum pengembangan ekonomi daerah yang bertujuan menjembatani program-program pemerintah pusat di daerah di bidang perekonomian. Selain itu, dalam rangka sinkronisasi program kegiatan terkait SRG, maka perlu dilakukan FGD untuk menyusun rencana aksi 2015 untuk pengembangan SRG rumput laut.

Sedangkan Deputy Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memaparkan, dalam langkah aksi 2015 akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk pengembangan ekonomi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana sebagian besar masyarakatnya merupakan kelompok pembudidaya rumput laut. Karena itu, akan dilakukan pemberdayaan untuk mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Lainnya, dalam menjaga kesinambungan rumput laut dari sisi hulu dan hilir maka diperlukan juga roadmap komoditi rumput laut dan pemetaan wilayah pengembangan industri rumput.

Sementara itu, perwakilan Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan, saat ini Kemenkop dan UKM sedang melakukan kegiatan pendampingan bagi koperasi-koperasi yang potensial sebagai pengelola gudang. Dan dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan terkait SRG sehingga petani dapat mengetahui manfaat dan keuntungan SRG.

"Kementerian Koperasi juga mendorong lembaga koperasi yang ada sebagai Pengelola Gudang SRG. Terkait itu, Kementerian Koperasi juga telah mempersiapkan stimulan bagi koperasi yang



berminta sebagai Pengelola Gudang SRG,” terang Retno Rukmawati.

Sementara itu, Kospermino dalam pandangannya mengatakan, sosialisasi SRG harus terus dilakukan terutama untuk para pelaku industri Rumput Laut di Indonesia. Sedangkan Perwakilan PT. Indonusa Algaemas Prima, mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi industri rumput laut adalah pasokan bahan baku tidak kontinue dan kualitas yang tidak konsisten. Dengan adanya SRG diharapkan dapat memutus mata rantai pemasaran rumput laut yang panjang sehingga menjamin adanya kepastian harga. Selain itu, SRG diharapkan dapat mengatasi masalah terkait konsistensi kuantitas dan kualitas Rumput Laut.

Sedangkan perwakilan Deputi Kemitraan Usaha, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memaparkan beberapa pandangan. Pertama, saat ini *pilot project* rumput laut dilakukan di kawasan Minapolitan yang dikoordinator oleh KKP. Kedua, untuk para pelaku usaha rumput laut sebaiknya dilakukan pendampingan dari level pembudidaya rumput laut sehingga dapat menjaga kualitas, jaminan harga dan menjaga kerjasama. Ketiga, perlu adanya pengembangan untuk

koperasi-koperasi lain yang berpotensi sebagai pengelola gudang SRG rumput laut.

Perwakilan Bank Indonesia juga mengungkapkan, saat ini BI sedang mengembangkan wilayah perbatasan di Nunukan dan mengembangkan klaster rumput laut di daerah tersebut. Sedangkan, untuk Bank BRI, saat ini telah memberikan bantuan untuk pengembangan budidaya rumput laut di daerah Nunukan, Bulukumba dan Jeneponto. Selain itu BRI telah melakukan verifikasi untuk Pengelola Gudang.


SRG komoditi rumput laut juga mendapat dukungan dari PT. Pos Indonesia. Sebagai Pengelola Gudang, PT Pos Indonesia siap dalam mendukung implementasi SRG komoditi Rumput Laut melalui jaringan distribusi yang terintegrasi secara online yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Direktorat Pengembangan Mutu Barang, Kementerian Perdagangan, memaparkan, dalam hal acuan standar mutu komoditi maka Dit. PMB dapat melakukan rekomendasi terhadap jaminan mutu sebelum barang masuk di gudang. Selain itu Dit. PMB memberikan pendampingan bagi laboratorium yang

belum mendapatkan akreditasi untuk uji mutu.

“Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Pokja SRG komoditi rumput laut itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Yakni, pertama, program pengembangan komoditi SRG Rumput akan dilakukan secara berkesinambungan baik dari sisi hulu maupun hilir. Di sektor hulu, perlu dilakukan pemetaan dan penataan kawasan budidaya rumput laut sesuai daya dukungnya. Di bagian hilir diperlukan pengembangan industri hilir yang meningkatkan nilai tambah,” jelas Retno.

Lebih jauh dikatakan, pembinaan dan pendampingan intensif secara berkelanjutan baik teknis maupun non teknis bagi kelompok pembudidaya rumput laut sangat diperlukan sehingga dapat menjaga konsistensi kualitas dan kuantitas komoditi rumput laut.

“Di samping hal-hal yang teknis tadi, Bappebti juga akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi program dan langkah-langkah aksi untuk pengembangan komoditi rumput laut di tahun 2015 mendatang,” tandas Retno Rukmawati. 





## Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Harus Gunakan SRG



Dekan Fak. Pertanian, Univ. Gajah Mada, Prof. DR. Jamhari

Sistem Resi Gudang- SRG harus disinergikan dengan program pemerintah Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang mencanangkan peningkatan produksi tanaman pangan komoditi gabah, jagung dan kedelai di tahun 2015 mendatang. Jika program peningkatan produksi tanaman pangan itu berhasil, tanpa didukung kesiapan pasar maka dapat dipastikan harga komoditi akan cenderung rendah. Akibatnya, petani tidak termotivasi untuk melakukan budidaya tanaman pangan.

"Jika program peningkatan produksi tanaman pangan dapat disinergikan dengan SRG, maka gudang SRG dapat dijadikan katup pengaman. Sehingga

harga komoditi relatif stabil dan memberi kepastian kepada para petani," demikian antara lain dikatakan Dekan Fak. Pertanian, Univ. Gajah Mada, Prof. DR. Jamhari, disela-sela sosialisasi SRG kerjasama Bappebti dengan Fak. Pertanian UGM, Yogyakarta, pada 27 November 2014, lalu.

Dikatakan Jamhari, dalam program peningkatan produksi tanaman pangan tersebut, Fak. Pertanian UGM menjadi salah satu perguruan tinggi yang mendapat penugasan dari Kementerian Pertanian. Di samping itu, masih ada sebanyak tujuh perguruan tinggi lainnya yang juga ditugaskan Kementerian Pertanian dalam mengawal program tersebut.

Lebih jauh dikatakan Jamhari, dari de-

lapan perguruan tinggi yang mendapat penugasan Pertanian tersebut, terungkap dalam sebuah pertemuan yang digagas Kementerian Pertanian pada awal bulan November 2014, lalu. "Setelah pertemuan itu, kami pun di Fak. Pertanian sudah merencanakan program yang akan mendukung Kementerian Pertanian tersebut," katanya.

"Bentuk program yang akan kami lakukan adalah, mahasiswa yang sudah memasuki akhir masa perkuliahan akan diterjunkan ke lapangan mendampingi petani. Dan, para mahasiswa itu akan dikelompokkan menjadi sekitar delapan orang serta didampingi satu dosen pembimbing. Jadi saat mahasiswa itu ada di lapangan, petani pun sudah dibekali berbagai pengetahuan tanaman pangan dan juga SRG. Sehingga hasil produksi bisa dimasukkan ke gudang SRG," tutur Jamhari.

"Saya juga baru mengetahui bahwa di wilayah Jateng ada sebanyak 11 gudang SRG dan 1 gudang di DIY. Dan dari informasi yang saya peroleh, sampai saat ini gudang-gudang tersebut belum optimal digunakan. Oleh sebab itu saya berharap program Kementerian Pertanian tersebut dapat disinergikan dengan SRG," jelasnya.

Namun demikian dikatakan Jamhari, salah satu langkah yang perlu dilakukan sebelum mengsinergikan program tersebut yakni mengoptimalkan sosialisasi SRG baik dikalangan petani maupun akademisi. Sehingga ada persepsi yang sama terhadap program yang akan dituju pemerintah tersebut.

"Karena itu, dalam pertemuan selanjutnya dengan Kementerian Pertanian, saya akan menekankan pemanfaatan gudang SRG untuk menampung komoditi yang dihasilkan petani. Karena kalau tidak ada mekanisme





yang dapat stabilkan harga komoditi, maka di masyarakat akan terdapat banyak persediaan dan berdampak harga menjadi rendah. Kalau harga komoditi tidak menguntungkan, petani pasti tidak akan mau menanam. Mereka akan memilih menanam komoditi yang lebih menguntungkan," kata Jamhari.

## Pendapatan Naik

Sementara itu, Kelapa Biro Perniagaan Bappebti, Pantas Lumban Batu, dalam paparannya kepada tentang SRG, mengatakan, SRG merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan pendapatan petani dari hasil pertanian. "Dari studi yang dilakukan pada petani gabah di Gapoktan Jaya Tani, Kab. Indramayu, Jabar, pendapatan tani meningkat sebesar Rp 2.951.885,29 per hektare," katanya.

"Peningkatan pendapatan petani sebesar Rp 2,9 juta per hektar merupakan hasil studi yang dilakukan salah seorang mahasiswa Fak. Ekonomi dan Manajemen, IPB, pada tahun 2011," jelas Pantas.

Sebelum petani menggunakan SRG, tambahnya, pendapatannya hanya sebesar Rp 6.864.010,22. Tetapi setelah menggunakan SRG, petani memperoleh peningkatan pendapatan menjadi Rp 9.815.895,51 per hektare. "Jadi ada selisih pendapatan petani sebelum dan sesudah adanya SRG yakni sebesar Rp 2.951.885,29 per hektare."

"Selain peningkatan pendapatan secara ekonomis, petani juga mendapat manfaat SRG seperti keamanan komoditi, jaminan mutu dan adanya informasi harga serta pemasaran," jelasnya.

Berdasarkan data Bappebti, hingga saat ini terdapat sebanyak 117 gudang SRG di 102 kabupaten dan di 25 provinsi. Sedangkan Resi Gudang yang telah diterbitkan sebanyak 1.741 resi dari 5 jenis komoditi (gabah, beras, jagung, kopi dan rumput laut) dengan nilai komoditi sebesar Rp 365,53 miliar. Dari nilai komoditi tersebut, petani memperoleh pembiayaan sebesar Rp 221,42 miliar. 📍

# SRG Salah Satu Prioritas Pemerintahan Baru

**M**enyikapi slogan "kerja..kerja.. kerja" dari Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kepala Bappebti, Sutriyono Edi mengajak kalangan akademisi meneliti penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di tanah air. Di samping itu, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan mahasiswa dapat mengambil peran sebagai petani, pengusaha, peneliti, investor, ahli komoditas dan Pengelola Gudang SRG.

"Slogan "kerja..kerja..kerja", yang disampaikan Presiden Joko Widodo, merupakan keinginan kuat untuk membangkitkan sektor ekonomi berbasis kerakyatan. Dan, ekonomi berbasis kerakyatan seperti SRG merupakan salah satu prioritas di pemerintahan baru," demikian dikatakan Sutriyono Edi, dalam sambutannya pada sosialisai SRG di Auditorium Fak. Pertanian Univ. Majalengka, Jabar, pada 11 November 2014, lalu

Hadir dalam kesempatan sosialisai SRG itu antara lain Rektor Univ. Majalengka Prof. Dr. H. A. Yunus, Bupati Majalengka, H. Sutrisno, SE., M.Si, Kepala Dinas KUKM Perindag Kab. Majalengka, Agus Permana, Dekan Fak. Pertanian Univ. Majalengka, Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), Perwakilan Bank BJB, penyuluh pertanian, dosen dan mahasiswa Univ. Majalengka, petani, Gapoktan se-Majalengka serta *stakeholder* SRG lainnya.

Lebih jauh dijelaskan Sutriyono Edi, sebagai negara agraris, sektor pertanian menyerap 35,9 % dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7 % terhadap GNP Indonesia (BPS, 2012).

"Karena itu, hemat kami SRG dapat menjadi solusi membangkitkan ekonomi kerakyatan."

"SRG ini berbasis kerakyatan dan manfaatnya menyentuh masyarakat di level bawah. Salah satu masalah dalam sektor pertanian adalah masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik, karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan. SRG merupakan solusi untuk masalah tersebut," terang Sutriyono.

Berdasarkan data Bappebti, sejak tahun 2009 Bappebti telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk membangun gudang sebanyak 98 gudang SRG di 78 kabupaten di 21 provinsi. Khusus di Provinsi Jawa Barat, telah dibangun 11 gudang SRG yang berlokasi di Cianjur, Garut, Bogor, Sumedang, Kuningan, Subang, Majalengka, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Untuk tahun 2014, Bappebti bersama 19 Pemda kembali melakukan pembangunan 19 gudang di 19 kabupaten. Gudang yang dibangun tersebut sudah dilengkapi dengan mesin pengering (*dryer*).

Secara akumulatif sampai 6 November 2014, jumlah resi gudang yang telah diterbitkan sebanyak 1.732 resi dengan total nilai sebesar Rp 355,60 miliar. Sedangkan nilai total pembiayaan yang telah diberikan oleh lembaga keuangan Bank BJB melalui skema subsidi resi gudang, mencapai sebesar Rp 220,54 miliar atau rata-rata 62 % dari nilai resi gudang yang diagunkan. 📍



## Revitalisasi PLKA Jateng

***Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) Jawa Tengah menjadi pioner dalam program revitalisasi pasar lelang di Indonesia. PLKA Jateng saat ini resmi dikelola dan diselenggarakan Koperasi Pasar Lelang Agro Jateng.***

Program revitalisasi PLKA telah diwacanakan Badan Pengawas perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti sebagai regulator sejak tahun 2010. Secara bertahap, sebanyak lima daerah yang masuk program revitalisasi PLKA tersebut, yakni pasar lelang Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Selatan.

Dengan program revitalisasi pasar lelang yang selama ini diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah, secara resmi pada 27 November 2014 diserahkan pengelolaan dan penyelenggarannya kepada **Koperasi Pasar Lelang Agro Jateng.**

"Revitalisasi pasar lelang kini lebih mengedepankan kemandirian dan profesionalisme. Diharapkan revitalisasi ini akan membentuk lembaga penyeleng-

gara pasar lelang yang mampu melihat peluang bisnis dalam mengembangkan pasar lelang sebagai suatu unit bisnis yang mendukung pemasaran komoditas di Indonesia," papar Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, dalam sambutannya saat Launching Revitalisasi Pasar Lelang Provinsi Jateng di Semarang, 27 November 2014 lalu.

Dengan revitalisasi, jelas Sutriyono, penyelenggaraan PLKA akan diserahkan dari dinas yang membidangi perdagangan kepada pihak swasta. Sehingga diharapkan PLKA ke depannya dapat mandiri dan profesional.

"Mandiri mempunyai arti penyelenggaraan dilakukan tanpa dukungan dari APBN atau APBD. Profesional mempunyai arti penyelenggaraan pasar lelang dilakukan





oleh pihak swasta atau lembaga koperasi, sehingga pengembangan pasar lelang dapat dilakukan secara optimal. Sedangkan dinas yang membidangi perdagangan akan fokus pada pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pasar lelang," tutur Sutriyono. Revitalisasi PLKA juga akan menerapkan sistem penjaminan yang bertujuan menjamin penyelesaian atas transaksi yang terjadi dan mengurangi resiko terjadinya gagal serah atau gagal bayar. Dalam pelaksanaannya, setiap penjual dan pembeli diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah dana jaminan/barang sebelum melakukan transaksi.

"Dalam melaksanakan penjaminan, Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah telah bekerjasama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia selaku lembaga kliring dan penjaminan pasar lelang," ujarnya.

Di sisi lain, sebagai sebuah lembaga perekonomian rakyat, Sutriyono mengharapkan Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah melakukan penguatan kelembagaan koperasi guna menjamin keberlangsungan koperasi tersebut mengingat perkembangan sistem ekonomi serta persaingan yang semakin ketat dengan pelaku ekonomi lain.

"Koperasi dapat melakukan diversifikasi bisnis yang mampu menunjang penyelenggaraan pasar lelang seperti pengangkutan, pergudangan, informasi, dan lain-lain. Dengan diversifikasi bisnis penunjang pasar lelang, Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah dapat memperoleh pemasukan tambahan yang dapat digunakan untuk menutup biaya operasional koperasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota," kata Sutriyono.

Sutriyono juga menambahkan bahwa, hingga tahun 2014, Bappebti menargetkan sebanyak empat PLKA lainnya yaitu pasar lelang Jawa Timur, Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Selatan, sudah dapat direvitalisasi. Sebagai catatan, pada tahun 2014, penyelenggara PLKA terdiri dari 13 Dinas Provinsi yang dibiayai APBN atau dana dekonsentrasi, dan 1 Dinas Provinsi yang dibiayai oleh APBD. Dalam kesem-



patan tersebut, Sutriyono juga menyerahkan persetujuan sebagai penyelenggara pasar lelang kepada Koperasi Pasar Lelang Agro Jawa Tengah.

## Dukung Daya Saing

Dengan PLKA, jelas Sutriyono, petani akan makin diuntungkan karena bisa mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Mata rantai perdagangan yang panjang dengan sendirinya dapat diputus. "Bappebti telah melaksanakan pasar lelang guna mendukung daya saing sektor perdagangan," tegas Sutriyono.

PLKA merupakan pasar terorganisir dan wahana bertemunya para pembeli dan penjual dengan menggunakan sistem lelang. Berdirinya pasar lelang bertujuan untuk efisiensi mata rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, menciptakan harga referensi, serta membangun dan memperluas jaringan usaha.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pelaku usaha swasta semakin meningkat dalam pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

Berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 33 ayat

(1) huruf (d) dinyatakan bahwa urusan pemerintah daerah di bidang pembinaan sistem resi gudang meliputi pemberian fasilitas pengembangan Pasar Lelang Komoditas.

## Naik 55,1%

Pelaksanaan PLKA di Jateng mengalami tren peningkatan dari Rp 98,7 miliar pada 2012 menjadi Rp 153,1 miliar atau naik 55,1 % pada 2013. Nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas di Jawa Tengah sampai bulan November 2014 mencapai Rp 93,4 miliar.

Secara keseluruhan, transaksi yang berhasil dibukukan dari penyelenggaraan pasar lelang periode 2003-2006 di Indonesia cenderung meningkat secara kumulatif. Pada 2013, tercatat nilai transaksi sebesar Rp 1 triliun atau naik 2,8 % dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 825,23 miliar.

Sementara itu, Januari-November 2014 tercatat nilai transaksi sebesar Rp 641,8 miliar. Sampai dengan November 2014, tercatat lima jenis komoditas dengan nilai transaksi terbesar nasional, yaitu beras (Rp 211,5 miliar, total volume 25.792 ton); jagung (Rp 79 miliar, total volume 29.734 ton); sapi (Rp 61,5 miliar, total volume 2.398 ton); ikan nila (Rp 24 miliar, total volume 1.032 ton); dan coklat (Rp 21,9 miliar, total volume 673 ton). ☛



## 2015 BKDI Prioritaskan Kontrak Komoditi Karet & Tambang

***Kisah sukses BKDI perdagangkan komoditi timah melalui mekanisme pasar fisik, menggoda manajemen untuk memperdagangkan komoditi karet dan komoditi tambang mineral. Selain itu, di tahun 2015 menjadi titik awal menuju sebahagian saham BKDI bisa dimiliki masyarakat.***

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI menempati urutan ke 45 sebagai bursa komoditi teraktif di dunia versi Majalah *Futures Industry*, Edisi September 2014, seakan menjadi amunisi untuk mengembangkan kontrak berjangka komoditi di tahun 2015 mendatang.

Di sisi lain, predikat yang sudah melekat sebagai bursa berjangka komoditi, membuat manajemen putar otak melakukan inovasi serta reorganisasi BKDI. Berbagai upaya yang dilakukan BKDI itu diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan industri perdagangan berjangka di dalam negeri dan tentunya semakin dikenal di mancanegara.

Dalam kaitan pengembangan produk kontrak berjangka komoditi, Dirut BKDI, Megain Widjaja, kepada Redaksi Buletin Berjangka, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini secara khusus mengatakan, prioritas utama yang dilakukan BKDI pada tahun 2015 adalah menginisiasi

peluncuran kontrak komoditi karet. Hal itu dikatakan Megain dikarenakan perundingan yang tak kunjung membuahkan hasil untuk membentuk bursa karet regional di antara negara produsen karet- Indonesia, Malaysia dan Thailand. Diharapkan kontrak komoditi karet itu akan mengangkat harga karet di tanah air dan di pasar mancanegara.

"Harga karet saat ini sudah terlalu lama berada di titik terendah. Itu dikarenakan tidak adanya pasar terorganisir komoditi karet di dalam negeri. Sebab itu, di tahun 2015 nanti, kami- BKDI memprioritaskan untuk meluncurkan kontrak komoditi karet," tegas Megain.

Diakui Megain Widjaja, perundingan anggota International Tripartite Rubber Council- ITRC untuk membentuk bursa karet regional masih berjalan alot. Hal itu dikarenakan adanya beda pandangan terhadap pasar karet di masing-masing negara anggota.

"Kalau kita menunggu terjalinya





kesempatakan itu, sampai kapan? Sedangkan petani karet saat ini sudah terlalu lama tidak menikmati harga yang menguntungkan. Jadi, kita harus berbuat sesuatu agar harga karet di dalam negeri terangkat dan pasarnya transparan," ujar Megain.

Kalau pemerintah memberi dorongan dan semua *stakeholder* mendukung, dalam waktu singkat harga karet akan menjadi terdongkrak. "Sebab itu saya tidak setuju jika bursa karet regional yang sudah dibahas berkali-kali, diselenggarakan di negara yang bukan negara produsen," katanya.

## Komoditi Tambang

**K**eberhasilan BKDI menghadirkan Bursa Timah di dalam negeri pada Agustus 2013, lalu, menjadi pembuktian kepada Kementerian ESDM untuk mengembangkan perdagangan fisik komoditi tambang. Di tahun 2015 mendatang, BKDI berencana perdagangan komoditi nikel, bauksit dan komoditi mineral lainnya yang memiliki pasar luas namun belum diperdagangkan di negara lain.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, khususnya Ditjen Minerba, untuk menciptakan pasar komoditi tambang seperti nikel dan bauksit di dalam negeri. Perdagangan komoditi tambang mineral potensial bagi Indonesia untuk menciptakan daya saing yang kuat dan meningkatkan devisa negara," jelas Megain.

BKDI sudah membuktikan kepada kita semua, sejak beroperasinya Bursa Timah, Indonesia sudah diperhitungkan sebagai negara produsen dan sekaligus pasar timah. Harga timah yang tercipta di BKDI sudah mempengaruhi pasar timah lainnya, tambahanya.

"Sejak Bursa Timah BKDI beroperasi, pendapatan *smelter* dan penerimaan negara dari sektor pajak dan royalti tambang timah semakin meningkat. Itu tidak terbantahkan. Jadi, mengapa kita tidak lakukan dengan komoditi mineral lainnya?" ujar Megain.

Kalau pemerintahan saat ini berniat menciptakan daya saing di pasar internasional dan meningkatkan pendapatan dari sektor pertambangan mineral, saya pikir ini saatnya bagi kita menciptakan pasar di dalam negeri.

Dikatakan Megain Widjaja, untuk menciptakan pasar komoditi tambang mineral di dalam negeri, harus ada komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* dan kalau mau di ekspor wajib diperdagangkan melalui bursa. "Kalau tidak ada unsur kewajiban diperdagangkan melalui bursa, sampai kapan pun tidak akan tercipta pasar di dalam negeri. Sebenarnya, kata 'wajib diperdagangkan melalui bursa' jangan dilihat dari sisi negatifnya saja, melainkan dilihat dari sisi positifnya," katanya.

Di sisi lain dijelaskan Megain, mungkin pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan yang spesifik mengharuskan pelaku komoditi bertransaksi lewat bursa. "Tetapi pemerintah bisa saja memberi insentif bagi pelaku usaha yang memperoleh komoditi ekspor melalui bursa. Misalnya, ketika pelaku usaha untuk mendapatkan komoditi di pasar domestik dikenakan beban pajak tinggi, tetapi ketika komoditi tersebut diperoleh dari transaksi bursa diberi keringanan pajak ekspor," katanya.

"Kami cukup yakin, perdagangan komoditi tambang mineral melalui bursa akan tercipta pasar yang transparan dan fair. Selama ini 'kan kita hanya 'dikadali' karena tidak punya data dan harga acuan, sehingga banyak komoditi tambang yang diekspor tanpa jelas asal usulnya dan tidak memberi manfaat bagi negara," papar Megain.

## Go-Public

**B**KDI di samping melakukan berbagai terobosan menciptakan produk-produk baru, di tahun 2015 mendatang akan dilakukan reformasi struktur manajemen. Hal itu dilakukan agar dalam lima tahun ke depan saham BKDI dapat dimiliki oleh masyarakat.

"Kami berkeinginan sebahagian sa-



ham BKDI bisa dimiliki masyarakat Indonesia melalui bursa saham. Dengan demikian BKDI bisa fokus dalam pengembangan industri ini dan menjalankan misinya sebagai acuan harga di dalam negeri," harap Megain.

Tetapi untuk mencapai ke kondisi itu, tambah Megain, BKDI perlu melakukan reformasi organisasi. "Ya, semacam pembenahanlah dari sisi internal. Kalau kami sudah bisa melakukan pembenahan itu, barulah dipikirkan bagaimana saham BKDI di tawarkan di bursa saham," katanya.

Lebih jauh diutarakan Megain Widjaja, untuk mencapai *go-public* di bursa saham, setidaknya diperlukan waktu sekitar tiga tahun untuk pembenahan internal. Selanjutnya dua tahun kemudian proses menuju *go-public*.

"Jadi setidaknya perlu waktu lima tahun lagilah, baru BKDI bisa *go-public*. Kami sangat mengharapkan saham BKDI bisa dimiliki masyarakat Indonesia, karena BKDI milik warga Indonesia. Tetapi jika nantinya saham BKDI dimiliki asing, itu pun tidak menjadi soal yang penting kita tetap memperdagangkan komoditi yang ada di Indonesia. Dengan demikian pun Indonesia bisa menjadi acuan harga komoditi dunia," tandas Megain Widjaja. 📍



# Agenda Foto



## Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka



**K**epala Biro Hukum, Sri Hariyati, mewakili Sekretaris Bappebti memberikan arahan sekaligus membuka Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka angkatan IV tahun 2014 yang diselenggarakan di Bandung, 21-22 November 2014.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Hariyati menekankan peran penting Wakil Pialang Berjangka dalam perdagangan komoditi. Oleh karena itu, diharapkan para Wakil Pialang Berjangka benar-benar menguasai bidangnya.

Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka ini diikuti 129 peserta yang berasal dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Lampung, Denpasar, Kalimantan dan Malang.

## Sosialisasi PBK di Universitas Sriwijaya, Palembang



**B**appebti menyelenggarakan sosialisasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Aula Gedung Magister Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Palembang, Kamis, 13 November 2014. Acara ini dibuka dengan kata sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi selaku tuan rumah, dan juga kata sambutan dari Kepala Bappebti, Sutriyono Edi.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 3 narasumber, yaitu; Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Pantas Lumban Batu; Direktur Jakarta Futures Exchange (JFX), Bihar Sakti Wibowo; dan Kepala Produk dan Layanan PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Stella Novita Lukman.

Acara itu dihadiri lebih dari 150 peserta yang berasal dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.





## Sosialisasi SRG di Universitas Majalengka

Kepala Bappebti, Sutriono Edi menjadi keynote speaker dalam acara sosialisasi SRG di Auditorium Fakultas Pertanian Universitas Majalengka, Jawa Barat, Selasa (11/11).

Sosialisasi bertajuk "SRG sebagai Alternatif Pembiayaan bagi Petani dan Pelaku Usaha dalam Menggerakkan Perekonomian Daerah". Dalam pemaparannya, Sutriono mengatakan, kampus memiliki peran strategis dalam melakukan perubahan. "Kami berharap kalangan civitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Majalengka dapat menjadikan SRG sebagai salah satu objek penelitian untuk pengembangan dan penyempurnaan implementasi SRG di Indonesia. Selain itu, menjadikan SRG menjadi salah satu program mata kuliah pilihan, terutama untuk mahasiswa tingkat akhir," katanya.

Acara ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Majalengka Prof. Dr. H. A. Yunus; Bupati Majalengka H. Sutrisno, SE., Msi.; Sekretaris Bappebti, Sri Nastiti Budianti; Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Retno Rukmawati.; Kepala Dinas KUKM Perindag Kabupaten Majalengka Drs. H. Agus Permana, MP; Dekan Fakultas Pertanian Universitas Majalengka, Direksi PT. Pos Indonesia (Persero), Perwakilan Bank BJB, dosen, penyuluh pertanian, mahasiswa, petani, Gapoktan se-Majalengka, serta seluruh *stakeholder* SRG.

## Persiapan Pembentukan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka



Kepala Bappebti Sutriono Edi yang didampingi oleh Kepala Biro Hukum Sri Hariyati dan Kepala Biro Perniagaan Pantas Lumban Batu, memberikan arahan dalam pembukaan Rapat Persiapan Pembentukan Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka di Kantor Bappebti, 12 November 2014.

Dalam arahnya, Sutriono Edi meminta pemilihan pengurus Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka agar dilaksanakan secara transparan dan kredibel sehingga dapat terpilih orang-orang yang memiliki integritas, pengetahuan luas, visi dan misi untuk memajukan Industri Perdagangan Berjangka di dalam negeri.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Bursa Berjangka, Kliring Berjangka dan Pialang Berjangka. Pembentukan Asosiasi Perdagangan Berjangka merupakan amanat UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## 86 % Investor Ritel Forex Merugi

National Futures Association-NFA (asosiasi perdagangan berjangka Amerika Serikat), mengatakan, sebagian besar investasi ritel perdagangan forex akan mengalami risiko kerugian.

Lebih jauh dikatakan, investor forex yang diperdagangkan di pasar over the counter- OTC, atau di dalam negeri dikenal dengan sistem perdagangan alternatif- SPA, rata-rata hanya bertahan selama empat bulan.

Selain itu, dikutip dari laman Bloomberg baru-baru ini, NFA mengatakan, investor ritel forex umumnya bukan berasal dari sektor keuangan atau tidak memiliki pengetahuan tentang investasi produk keuangan.

"Tetapi kemudian, investor ritel forex



menjadi tertarik dikarenakan adanya penawaran yang menjanjikan. Seperti dikatakan, keuntungan perdagangan forex dapat membiayai hidupnya hingga hari tua kelak," jelas NFA.

Sementara itu, menurut laporan

FXCM Inc., dan Gain Capital Holdings Inc., rata-rata 86 % investor ritel forex mengalami kerugian pada periode empat kuartal terakhir. Akibatnya, banyak investor ritel forex yang menjadi kapok melakukan perdagangan. ❧

## Bappebti, OJK dan BI Bahas Obligasi Negara Berjangka



Bappebti melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk merampungkan produk obligasi negara berjangka. Pertemuan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi tiga lembaga negara tentang produk tersebut. Kepala Biro Analisis, Bappebti, Mardjoko, mengatakan, sambil menunggu pertemuan tiga

lembaga negara itu, Bappebti juga meminta kepada Jakarta Futures Exchange- JFX dan PT Kliring Berjangka Indonesia- KBI untuk menyiapkan sistem pengawasannya.

"Produk ini 'kan menjual surat utang negara, berarti membawa nama baik negara sehingga produk ini harus dibentuk sistem yang baik. Jadi bila produknya sudah fix dari otoritas, pihak bursa bisa langsung menjalankan produknya," kata Mardjoko.

Dalam produk obligasi negara berjangka, yang diperjualbelikan adalah tenor obligasinya. Nanti pihak bursa akan memberikan referensi berbagai macam tenor obligasi yang kredibel dan permintaannya tinggi di pasaran, berdasarkan permintaan sebelumnya dan kondisi pasar saat itu. Lalu obligasi negara berjangka itu akan diperjualbelikan pada waktu dan harga yang telah ditentukan sebelumnya di bursa.

Dikatakan Mardjoko, produk obligasi negara berjangka yang akan diperjualbelikan kemungkinan adalah obligasi negara dengan tenor jangka pendek di kisaran satu sampai lima tahun dan dianggap banyak investor yang menginginkan keuntungan dalam waktu cepat.

"Untuk mematangkan sistem pengawasan produk obligasi negara berjangka itu, maka JFX dan KBI telah melakukan studi banding ke Singapura untuk melihat sistem produk-produk keuangan berjangka di sana," imbuh Mardjoko. ❧





## Tim Formatur Siap Seleksi Pengurus AIPB

**A**sosiasi Industri Perdagangan Berjangka- AIPB yang diamanatkan pada Pasal 44A, UU No. 10 Tahun 2011, tentang perdagangan berjangka komoditi, semula ditargetkan akan terbentuk pada bulan November 2014, ini. Namun, tampaknya target yang ditetapkan Kepala Bappebti, Sutriono Edi pada bulan Agustus lalu, bakal meleset. Sebab, baru pekan lalu terbentuk Tim Formatur yang akan melakukan seleksi calon Ketua AIPBI.

Menurut I Gede Raka Trantra (IGRT), salah satu anggota Tim Formatur, kepada Redaksi Buletin Bappebti, mengatakan, kami-Tim Formatur baru satu kali melakukan pertemuan. Dan belum menentukan kriteria bakal calon Ketua AIPB. "Secepatnya kami akan melakukan pertemuan lagi," katanya.

Ditambahkan IGRT, saat ini terdapat sebanyak 20 sponsor terbentuknya AIPB, yang berasal dari industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. "Masing-masing sponsor itu nantinya bisa mengajukan dua nama yang dapat dijadikan bakal calon ketua. Sosok calon ketua yang diajukan pun tidak dibatasi dari industri perdagangan berjangka, melainkan *public*

*figure* lainnya pun bisa diajukan," jelas IGRT.

Lebih jauh dikatakan, melihat banyaknya nama yang akan menjadi calon ketua, diperkirakan AIPB baru akan terbentuk di awal tahun 2015 mendatang. Di samping itu dijelaskan, Tim Formatur akan bertugas melakukan *fit and paper test* sesuai kriteria yang akan ditetapkan.

Tim Formatur terdiri dari sebanyak tujuh tokoh, dan lima diantaranya pernah bertugas di Bappebti. Seperti mantan Kepala Bappebti, Ardiansyah Parman, mantan Sekretaris Bappebti, Eddy Suseno, mantan pejabat Bappebti, Syahnil, Chrisnawan Triwahyudiyanto dan IGRT. Selain itu, juga terdapat dua tokoh dari unsur pelaku industri perdagangan berjangka yang berasal dua bursa berjangka di Indonesia.

"Kita sangat berharap AIPB segera bisa terbentuk sehingga integritas industri perdagangan berjangka diperhitungkan dunia usaha lain. Dan bisa mengembangkan industri ini sesuai amanat undang-undang, sebagai sarana pemebentukan harga dan manajemen risiko," tandas IGRT. ☞

## JFX Cabut Izin Dua Anggota Bursa

**S**urat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) milik PT Rex Capital Futures (RCF), per 20 November 2014 resmi dicabut Jakarta Futures Exchange (JFX). Putusan pencabutan SPAB itu dimuat dalam surat JFX yang ditujukan pada Direksi PT Rex Capital Futures, No. L/JFX/DIR/11-14/839, perihal Pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT Rex Capital Futures.

JFX dalam keterangannya, mengatakan, pencabutan SPAB PT Rex Capital Futures merupakan tindak lanjut surat keputusan Bappebti No. 09/BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/SA/11/2014, tertanggal 20 November 2014, Tentang Pencabutan Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Sebagai Pialang Berjangka Atas Nama PT Rex Capital Futures.

"Dengan dicabutnya izin usaha tersebut, RCF sudah kehilangan semua haknya sebagai anggota bursa. Dan jika ada posisi terbuka milik nasabah harus dialihkan ke perusahaan pialang lain yang



bersedia menerimanya," katanya.

Namun, kewajiban keuangan RCF terhadap nasabahnya harus tetap dipertanggungjawabkan, tambahnya. Sebab itu, JFX menghimbau agar nasabah tetap memonitor status dan proses penyelesaian posisi terbuka dan rekening masing-masing.

Di samping itu, pada tanggal 17

November 2014, lalu, JFX juga resmi mencabut Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT – AXO. Putusan Direksi JFX tertuang pada No. L/JFX/DIR/06-14/470L/JFX/DIR/11-14/825, perihal Pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT Axo Capital Futures.

"Pencabutan SPAB itu merupakan tindak lanjut surat Bappebti, yang kami terima Oktober lalu. Dan kami- JFX pun telah melakukan monitoring pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan AXO," jelas Bihar.

Lebih jauh Bihar menjelaskan bahwa, AXO telah melanggar Peraturan Kepala Bappebti No. 95/BAPPEBTI/PER/06/2012, Pasal 15 yang dibuktikan dengan ditemukannya fakta bahwa AXO telah beberapa kali melakukan pindah kantor tanpa persetujuan Bappebti. "Kami juga menemukan pelanggaran terhadap undang-undang dan ketentuan lain, seperti melakukan pengelolaan dana nasabah pada rekening terpisah," jelas Bihar Sakti Wibowo. ☞



## Langkah ITRC Dongkrak Harga Karet Dunia

Negara-negara produsen karet dunia sepakat meningkatkan harga karet di pasar internasional dengan berbagai cara. Kesepakatan ini terungkap pada pertemuan tingkat Menteri International Tripartite Rubber Council- ITRC, yang diselenggarakan Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (20/11). Pertemuan ITRC itu dihadiri Menteri Perdagangan RI, Rachmat Gobel, Menteri Pertanian dan Koperasi, Thailand dan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Malaysia. Selain itu, forum ITRC juga mengundang Menteri Perdagangan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

"Semua produsen karet sudah bersepakat untuk meningkatkan harga karet di pasar internasional. Karena itulah forum ITRC mengundang negara produsen karet yang tidak menjadi anggota ITRC, seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Meski produksi mereka relatif kecil sekitar 10 %, tetapi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, sepakat untuk meningkatkan harga karet dunia. Idealnya harga karet dikisaran US\$ 2,5 per kg," demikian antara lain diutarakan Direktur Kerja Sama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Deny Wachyudi Kurnia.

Lebih jauh dikatakan Deny, langkah yang disepakati untuk meningkatkan harga karet yakni menahan laju ekspor dengan memperhatikan *supply and demand*. "Di samping itu, para petani melakukan regenerasi tanaman karet yang sudah tua."

"Disepakati juga tidak ada perluasan kebun karet baru hingga harga karet di pasar internasional mencapai tingkat keekonomian," tegas Deny Wachyudi Kurnia. ☞

## Produksi CPO 2015 Diprediksi 31,5 juta ton

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) memprediksi, produksi CPO tahun depan sebanyak 31,5 juta ton atau naik tipis ketimbang tahun ini yang sebanyak 30 juta ton. Kenaikan terjadi karena kondisi cuaca tahun ini lebih baik ketimbang 2012 dan 2013. Walaupun di awal oleh curah hujan yang tinggi, namun sepanjang tahun 2014, kondisi jauh lebih baik. Bahkan musim kemarau yang melanda selama Agustus-Oktober pun tak separah sebelumnya.

Beberapa pengusaha kelapa sawit dalam negeri juga optimis produksi CPO di akhir 2015 bisa mencapai 32,5 juta ton. Darwin Indigo, Direktur Perdagangan Indonesia PT Wilmar International Limited mengatakan, produksi CPO tanah air memang menunjukkan tren kenaikan.

Beberapa perusahaan pun sebelumnya sudah melakukan ekspansi perluasan lahan baru. Nah, dampak ekspansi ini bakal mulai terlihat tahun depan. Sebab, pembukaan lahan baru memang akan terasa dalam tiga tahun sampai lima tahun kemudian.

Saat ini, tanaman baru mulai menghasilkan. "Tahun ini cuaca cepat berubah, yakni sempat kering dan tidak hujan. Sementara pada awal tahun, curah hujan cukup tinggi," kata Darwin, baru-baru ini.

Permintaan CPO dari pasar internasional yang makin turun ternyata tak terlampaui mengkhawatirkan bagi industri. Soalnya, permintaan dalam negeri kini menunjukkan tren kenaikan, terutama untuk kebutuhan biodiesel. Tahun depan, konsumsi dalam negeri bakal mencapai 30 %. Tahun ini, persinya baru 20 % dari total produksi yang sebesar 30 juta ton. Artinya, penggunaan CPO dalam negeri bakal mencapai 9 juta ton. Perinciannya, sebesar 6 juta ton sampai 7 juta ton untuk industri makanan dan minuman, sisanya 2 juta ton-3 juta ton untuk industri kimia. ☞

## Ekspor Kopi ke Tiongkok Capai US\$ 1,17 miliar

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan RI menargetkan ekspor di sektor makanan dan minuman olahan terdongkrak hingga 9,5 %, menyusul ekspor kopi tahun lalu sudah menembus angka US\$ 1,17 miliar.

"Sebagai penghasil kopi terbesar ke-3 di dunia setelah Brazil dan Vietnam, Indonesia wajib mendorong ekspor kopi. Nilai ekspor kopi pada tahun 2013 mencapai US\$ 1,17 miliar. Kami harapkan nilai ekspor makanan olahan Indonesia terdongkrak hingga sebesar 9,5 % - 10,5 %," jelas Dirjen PEN, Nus Nuzulia Ishak, dalam keterangan tertulisnya yang diterima margind.

com, akhir pekan lalu.

Dikatakan Nus, Tiongkok merupakan pasar potensial produk kopi Indonesia. Hal itu terbukti Tiongkok menempati urutan ke 18 sebagai importir kopi Indonesia.

"Nilai ekspor kopi ke Tiongkok selama lima tahun terakhir terus tumbuh dengan tren sebesar 82,6 %. Pertumbuhan impor kopi itu dikarena gaya hidup minum kopi yang menggeser konsumsi teh di Tiongkok. Jadi, kami melihat ini sebagai peluang untuk memperluas pasar kopi Indonesia di Tiongkok," ujar Nus Nuzulia Ishak. ☞





## Sutriyono Edi: “Warehouse Receipts system is one of government new priority”

Referring to the motto “working..working..working” from President Joko Widodo-Jusuf Kalla work cabinet, Coftra’s Head, Sutriyono Edi asked academics to review the implementation of warehouse receipt system in Indonesia. Moreover he also hoped that in the next couple years, academicians can take the role as farmers, businesses, scientist, investors, commodity expert and management of SRG warehouses.

The theme that was delivered by President Joko Widodo reflects strong will to raise people-based economic sector. And this people-based economy such as warehouse receipt system is one of new government’s priorities,” Sutriyono Edi said in his speech on SRG socialization at Auditorium of Majalengka University, Agricultural Faculty, West Java on Tuesday (11/11/2014).

Sutriyono Edi, moreover, explained as agricultural country, agriculture sector absorbed 35.9% of total Indonesian labor force and donate 14.7% of Indonesian GNP (BPS,2012). “Therefore in our opinion SRG can be a solution to raise people economy.”

“This SRG with people and its benefit has touched low level society. One of problems on agriculture sector is the long link of agriculture trade system that has caused farmer cannot get better price as trader has taken too much profit from the trading. SRG is the solution for this problem,” Sutriyono explained. ☺

## IPOC as promotion media of CPO Indonesia

The 10th Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) and 2015 Price Outlook has been held again by Indonesian Crude Palm Oil businesses joint venture (GAPKI) on 26 th – 28th of November 2014 at the Trans Luxury Hotel, Bandung, West Java.

According to IPOC promotor committee chairman, Mona Surya, to the media on Thursday (6/11) in Jakarta, the event was held to promote Indonesian crude palm oil (CPO) and to follow the recent growth of palm oil industry. “Therefore, we are targeting IPOC participants about 1.500 people from 36 countries. This amount is increased compares with last year event that only reached 1.300 participants,” she said.

“Recently IPOC is a media for businesses to spread their business link from product exhibition, sponsorship or even face to face meeting with potential buyer,” Mona said.

Moreover she explained that the 10<sup>th</sup> IPOC’s theme is Transforming Palm Oil Industry, Enhancing Competitiveness. “The theme will be focused on the discussion of how to increase and strengthen competitiveness for the next level of industry transformation.”

“Crude palm oil recently has become Indonesian economic pillar with a contribution of surplus foreign exchange of palm oil ever year. Indonesia nowadays has become the biggest country of crude palm oil producer in the world and dominate 38% of world vegetable oil market share,” Mona Surya added. ☺

## Trading Minister, Rachmat Gobel; Targeting 300% of export increase from Sea and Fishery sector

Minister of Trade, Rachmat Gobel is optimistic that he can increase export target to 300% from sea and fishery sector support. As he said the only challenge is to discipline illegal fishing that lately is spread on Indonesia sea.

“We are very optimist to set a target on export increase of 300% because on the past 10 years we could not maximize the sea and and fishery sector. Therefore we need to catch up.” Rachmat Gobel explained int the middle of Economic Outlook Indonesia 2015 that was held at Center of Reform on Economics (CORE) in Jakarta on Thursday (06/11/2014).

Moreover Rachmat Gobel said that to reach the export raise target to 300% from sea and fishery sector, his department has coordinated with Ministry of Marine Affairs and Fisheries. “I have coordinated with Ms., Susi – the Minister of Marine Affairs

and Fisheries, She said that she will exterminate all illegal fishing. Therefore I am very optimistic that our export can increase 300%.” He said.

On the other side Rachmat Gobel said there are 3 main purposes that will be accomplished by Ministry of Tradey at least in the next 5 years, which increase the export value, strengthen domestic market and maintain price stabilization. “Because of that, it’s very important to coordinate with related ministry to reach that target.”

“Communication is currently on progress to support export and increase national product competitiveness. If the coordination with some ministries are in good progress, we are optimist that Indonesia can produce the commodity for domestic and foreign market.” Rachmat Gobel said. ☺



## PENERBITAN RESI GUDANG BULAN SEPTEMBER 2014

		Penerbitan				
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	<b>PT. Pertani (Persero)</b>					
	- Sidrap (Maritengae)	Gabah	4	646	4.500	2.905.875.000
	- Pinrang (Watang Sawito)	Gabah	2	310	4.500	1.395.225.000
2.	<b>PT. BGR (Persero)</b>					
	- Aceh Tengah (Bebesan)	Kopi	1	5	40.000	204.000.000
3.	<b>Koperasi Niaga Mukti</b>					
	- Cianjur (Warungkondang)	Gabah	4	105	6.242	657.260.000
4.	<b>PT. Pos Indonesia (Persero)</b>					
	- Tasikmalaya (Jamanis)	Gabah	4	50	5.000	250.000.000
5.	<b>KUD Tuntung Pandang</b>					
	- Barito Kuala (Marabahan)	Gabah	6	67	6.000	404.706.000
<b>Jumlah</b>		<b>Gabah</b>	<b>20</b>	<b>1179</b>	<b>5.248</b>	<b>5.613.066.000</b>
<b>Total</b>		<b>Kopi</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>40.000</b>	<b>204.000.000</b>
			<b>21</b>	<b>1.184</b>		<b>5.817.066.000</b>

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

## PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN SEPTEMBER 2014

		Penerbitan			Pembiayaan		
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKNB
1.	<b>PT. Pertani (Persero)</b>						
	- Sidrap (Maritengae)	Gabah	4	646	3	1.570.000.000	BRI
	- Pinrang (Watang Sawito)	Gabah	2	310	2	950.000.000	BRI
2.	<b>PT. BGR (Persero)</b>						
	- Aceh Tengah (Bebesan)	Kopi	1	5	-	-	-
3.	<b>Koperasi Niaga Mukti</b>						
	- Cianjur (Warungkondang)	Gabah	4	105	4	459.602.000	Bank BJB
4.	<b>PT. Pos Indonesia (Persero)</b>						
	- Tasikmalaya (Jamanis)	Gabah	4	50	-	-	-
5.	<b>KUD Tuntung Pandang</b>						
	- Barito Kuala (Marabahan)	Gabah	6	67	5	254.000.000	Bank Kalsel
<b>Jumlah</b>		<b>Gabah</b>	<b>20</b>	<b>1179</b>	<b>14</b>	<b>3.233.602.000</b>	
<b>Total</b>		<b>Kopi</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
			<b>21</b>	<b>1.184</b>	<b>14</b>	<b>3.233.602.000</b>	

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI





## NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG BULAN OKTOBER 2014

NO.	Wilayah	Nilai Transaksi Periode Oktober 2014 (Rp.)	Nilai Transaksi Oktober 2013 (Rp.)	Nilai Transaksi Jan-Oktober 2014 (Rp.)
1.	Sumatera Barat	496.230.500	496.230.500	17.975.973.000
2.	Jambi	3.990.200.000	3.990.200.000	16.222.441.000
3.	Lampung	3.940.600.000	3.940.600.000	8.939.200.000
4.	Jawa Barat	6.897.000.000	6.897.000.000	61.550.855.000
5.	Jawa Tengah	3.432.500.000	3.432.500.000	93.409.115.000
6.	Yogyakarta	6.255.500.000	6.255.500.000	77.167.200.000
7.	Jawa Timur	20.785.000.000	20.785.000.000	167.217.650.000
8.	Bali	600.000.000	600.000.000	7.435.437.500
9.	NTB	1.483.400.000	1.483.400.000	29.557.825.000
10.	Sulawesi Utara	15.107.234.000	15.107.234.000	84.817.159.000
11.	Sulawesi Selatan	12.589.500.000	12.589.500.000	38.305.850.000
12.	Sulawesi Tenggara	1.049.936.000	1.049.936.000	13.422.461.000
13.	Gorontalo	Nihil	Nihil	6.899.600.000
14.	DKI	Nihil	Nihil	7.418.500.000
15.	PT iPASAR Indonesia	Nihil	Nihil	130.000.000
16.	Pasar Fisik CPO	Nihil	Nihil	Nihil
<b>TOTAL</b>		<b>76.627.100.500</b>	<b>90.215.997.000</b>	<b>630.469.266.500</b>

Sumber: Bappebti

## PENYELENGGARAAN DAN NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG SPOT PERIODE SEPTEMBER 2014

Komoditas	Penawaran Oktober 2014	Transaksi Januari - Okt 2014	
	Kuantitas	Kuantitas	Nilai (Rp)
Jati	0	0	0
Mahoni	0	0	0
Jagung	522.000 Kg	40.000 Kg	130.000.000
Rumput Laut	0	0	0
Kopi	84.000 Kg	0	0
Gondorukem	2.131 Ton	0	0
<b>TOTAL NILAI TRANSAKSI</b>			<b>130.000.000</b>

Sumber: PT iPASAR, data diolah



## Menanti 'Kelahiran' AIPB

### Pengantar Redaksi;

Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka- AIPB merupakan salah satu amanat undang-undang perdagangan berjangka komoditi No. 10 Tahun 2011. Terkait itu, Kepala Bappebti mendorong pembentukan AIPB melalui kebijakannya yang tertuang pada SK Kepala Bappebti No. 111 Tahun 2014. Berdasarkan informasi terakhir, Tim

Formatur pemilihan pengurus AIPB saat ini tengah bekerja menggodok tokoh-tokoh yang bakal menduduki jabatan penting asosiasi tunggal industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air. Berikut ini beberapa poin penting dari kebijakan Kepala Bappebti terkait pembentukan AIPB.

Setiap pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka- AIPB. Lalu, apa tugas dan wewenang AIPB?

Berikut sejumlah tugas AIPB merujuk SK Kepala Bappebti No. 111 Tahun 2014, pada pasal 8 diutarakan;

1. Memberikan pelayanan prima kepada para anggotanya di dalam pengembangan usahanya khususnya yang terkait dengan pengembangan kontrak dan produk yang akan diperdagangkan.
2. Menyediakan informasi kepada para anggota yang terkait dengan kebijakan yang diterbitkan oleh Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan instansi lainnya yang terkait dengan industri Perdagangan Berjangka.
3. Menyelenggarakan pertemuan dengan para Anggota untuk membahas isu-isu penting yang terkait dengan kepentingan anggota.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan pihak-pihak lain yang ingin berprofesi di bidang PBK.
5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang PBK.
6. Membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar anggota.
7. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan komoditi yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka.
8. Mewakili anggota dalam pertemuan-pertemuan secara nasional maupun internasional yang memberikan manfaat bagi anggota.
9. Melakukan pembinaan terhadap anggota untuk menjaga integritas industri Perdagangan Berjangka dan pemenuhan tanggung jawab anggota terhadap kewajiban-kewajibannya.
10. Menyusun kode etik profesi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang PBK.



11. Melakukan penegakan kode etik profesi.
12. Meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kepatuhan para anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan di bidang PBK.
13. Memperjuangkan kepentingan para anggota secara eksternal berupa nasihat hukum, bantuan hukum, dan mediasi.
14. Menyusun peraturan dan tata tertib Asosiasi dan perubahannya.
15. Adapun wewenang AIPB juga tertuang dalam SK Kepala Bappebti No 111 Tahun 2014 Pasal 9, yaitu;
16. Menetapkan persyaratan dan kualifikasi untuk dapat menjadi anggota.
17. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain.
18. Melakukan kerjasama dengan semua pemangku usaha dalam rangka mengembangkan PBK.
19. Sementara itu, tujuan dibentuknya AIPB berdasarkan Pasal 2 Ayat (2), disebutkan;
20. Membantu perkembangan PBK dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan.
21. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor PBK melalui pendidikan dan pelatihan.
22. Meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kepatuhan para anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan di bidang PBK melalui penerapan kode etik profesi.
23. Memperjuangkan kepentingan para anggotanya di bidang PBK.
24. Melakukan sosialisasi kepada para anggotanya di seluruh Indonesia.





## Dibalik Turunya Harga Karet Dunia

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan ekspor karet terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia sebagai negara yang terbesar di dunia untuk luas areal karet dengan luas 3,4 juta hektar, diikuti Thailand seluas 2,6 juta hektar dan Malaysia 1,02 juta hektar.

Meski memiliki lahan terluas, produksi karet Indonesia tercatat hanya sebesar 2,4 juta ton atau di bawah produksi Thailand yang mencapai 3,1 juta ton, sedangkan produksi karet Malaysia mencapai 951 ribu ton. Berdasarkan data tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk melakukan ekspor karet ke pasar dunia, mengingat luas areal karet dibandingkan dengan negera-negara lain yang menghasilkan karet juga.

Namun sayangnya, harga karet dunia saat ini sedang mengalami penurunan. Ketua Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Jambi, Lukman Zakaria saat berdialog dengan Wakil Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat Bayu Krisnamurthi dan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tanggal 9 Mei 2014 lalu, menyatakan, kondisi karet alam

dunia saat ini sedang menghadapi tantangan berat dengan menurunnya harga karet hingga mencapai USD1,64 per kilogram.

Pada tanggal 19 Juni 2014, telah dilakukan pertemuan mengenai posisi Indonesia dalam menghadapi masalah harga karet dunia di Gedung Kemendag (Kementerian Perdagangan), yang dipimpin oleh Ditjen Kerja Sama APEC dan OIL Kemendag dan dihadiri oleh wakil dari Ditjen Ekspor Produk Pertanian & Kehutanan, Ditjen Daglu Kemendag, wakil dari BP2KP Kemendag, wakil dari Bappebti Kemendag, wakil dari Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Gabungan Perusahaannya Karet Indonesia (Gapkindo), Pelaku Usaha, dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan instansi dan pelaku usaha terkait, maka satu faktor yang diduga menyebabkan turunnya harga karet di pasar dunia adalah adanya intervensi dari salah satu negara yang memproduksi karet, yakni Thailand. Saat ini, di Thailand terjadi penanaman dan produksi karet yang berle-

bihan, diperkirakan ada 700.000 ton karet yang terbengkalai di Thailand.

Hal ini tentu saja mengakibatkan turunnya harga karet di pasar dunia karena terjadinya over supply dari Thailand. Namun sungguh sayang, Pemerintah Thailand tidak bisa melarang warganya yang menanam karet. Hal ini mengakibatkan adanya intervensi harga dari negara konsumen karet karena adanya over supply sehingga membuat harga karet turun.

Gapkindo menyatakan, Thailand telah melanggar kesepakatan di International Tripartite Rubber Council (ITRC). Di ITRC telah disepakati adanya pembatasan kuota produksi karet di masing-masing negara yang memproduksi karet untuk tiap tahunnya. Adapun negara-negara yang menjadi anggota ITRC adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Gapkindo juga menyatakan bahwa seharusnya Thailand dapat memproduksi karet dengan menggunakan lahan produksi maksimum 330 hektar. Tapi, realitanya Thailand menggunakan lahan untuk memproduksi karet dengan menggunakan lahan 400.000 hektar. Hal tersebut tentu saja memberikan dampak



negatif bagi pihak internal dan eksternal.

Di sisi pihak internal Thailand, belum ditemukan solusi bagaimana cara mengatasi adanya kelebihan produksi Thailand sebesar 700.000 ton karet yang sedang menganggur dan tidak termanfaatkan dengan optimal. Selain itu, membiarkan adanya kondisi menganggurnya 700.000 ton karet di Thailand saat ini mengakibatkan turunnya harga karet di dunia.

Dampak dari sisi eksternal, negara anggota ITRC lainnya, seperti Indonesia dan Malaysia merasakan pula akibat dari kelebihan produksi karet Thailand dengan dibatasinya kuota produksi karet. Menurut Pihak GAPKINDO, pembatasan kuota produksi karet untuk negara anggota ITRC lainnya untuk mengontrol adanya kelebihan produksi karet Thailand ini dinilai tidak adil. Hal ini disebabkan karena masalah yang timbul saat ini merupakan hasil dari pelanggaran kesepakatan oleh Thailand yang pada akhirnya merugikan banyak pihak, terutama negara-negara yang memproduksi karet.

## Solusi

Solusi yang digencarkan saat ini adalah jika Pemerintah Thailand tidak mampu untuk menanggulangi kelebihan produksi karet sebanyak 700.000 ton yang sedang menganggur tersebut, maka 700.000 ton karet tersebut akan dibuang ke laut. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan harga karet di pasar dunia.

Ditjen Kerja sama Perdagangan Internasional Kemendag, memberikan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan terkait kelebihan produksi karet di Thailand.

Pertama, Indonesia membuka market operation dalam negeri untuk konsumsi karet. Hal ini dinilai penting untuk membuka peluang konsumsi karet di Indonesia sehingga produksi karet Indonesia tidak hanya digunakan untuk keperluan ekspor tapi juga untuk keperluan konsumsi dalam negeri. Dalam menanggapi usulan ini, Kementerian Pekerjaan Umum



*“Satu faktor yang diduga menyebabkan turunnya harga karet di pasar dunia adalah adanya intervensi dari salah satu negara yang memproduksi karet, yakni Thailand. Saat ini, di Thailand terjadi penanaman dan produksi karet yang berlebihan, diperkirakan ada 700.000 ton karet yang terbengkalai di Thailand.”*

sudah melakukan kerjasama dengan Bina Marga untuk penggunaan produk karet Indonesia.

Kedua, perlu adanya negosiasi dengan negara-negara konsumen karet dalam menghadapi kelebihan produksi karet di Thailand. Menurut Gapkindo para eksportir karet Indonesia lebih sering melakukan ekspor karet ke negara-negara di Eropa dibandingkan ke Tiongkok.

Ketiga, melakukan ekspansi anggota ITRC seperti Laos dan Vietnam. Solusi

tersebut diusulkan karena untuk menguatkan branding negara-negara yang memproduksi karet di wilayah Asia dan mempertahankan warna IRC sebagai produsen karet. Sebagai tindak lanjut, diharapkan pejabat pemerintah dari 3 negara di ITRC untuk mendiskusikan agar Vietnam bergabung dan tidak perlu takut karena pohonnya yang akan ditebang.

Ke-empat, seharusnya ada koreksi data dan peninjauan kembali tentang data ekspor karet Indonesia. Hal ini disebabkan data ekspor karet di beberapa lembaga instansi pemerintah berbeda-beda. Padahal adanya data tersebut dinilai penting untuk membuat kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, sebaiknya perlu menunjuk satu lembaga independen untuk analisis data sehingga dapat dijadikan rujukan karena statistik di ITRC masih lemah.

Dengan demikian, diharapkan penurunan harga karet yang terus berlangsung sampai saat ini di bisa teratasi. Yaitu dengan mengoptimalkan kebutuhan produk karet untuk industri dalam negeri, serta tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara tujuan ekspor karet Indonesia. ❁ \*)Ary Miftakhul Huda, Staf Biro Analisis Pasar, Bappebti.





## Yap Stephen Sanjaya

# Cintai PBK, Nyaman Bersama Keluarga

**B**erawal dari cerita-cerita teman dan menyaksikan film bertema sukses bisnis saham di Wallstreet, Amerika Serikat, membuat Yap Stephen Sanjaya tertunda menyelesaikan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Dia pun aktif bertransaksi saham dan forex sejak tahun 1995 di berbagai perusahaan yang menawarkan jasa investasi.

Berbekal pengalaman transaksi saham dan forex itu, di tahun 2001, Stephen mencoba peruntungan sebagai tenaga marketing di salah satu perusahaan pialang berjangka di Surabaya. Di perusahaan pialang itu jabatan terakhirnya adalah manager marketing. Dan di tahun

2006, dia pun memutuskan untuk pindah perusahaan ke PT Agrodana Futures, Cabang Surabaya. Di perusahaan ini, Stephen demikian akrab dipanggil, langsung menduduki jabatan senior manager marketing.

Bergabung selama satu tahun bergabung di Agrodana, tepatnya di tahun 2007 hingga saat ini, Stephen pun dipercaya sebagai Kepala Cabang PT Agrodana Futures, di Surabaya.

“Saya termasuk orang yang mencintai bisnis investasi di bidang perdagangan berjangka ini. Karena sangkin cintanya, pendidikan S1 saya sempat tertunda. Kemudian di tahun 2008 saya baru bisa menyelesaikan pendidikan S1 dari Institut



Pembangunan Surabaya- IPS,” tutur Stephen mengenang masa lalunya.

Dikatakan Stephen, salah satu faktor yang memotivasinya menyelesaikan pendidikan S1 dikarenakan persyaratan sebagai Wakil Pialang Berjangka (WPB), seperti ditentukan otoritas perdagangan berjangka komoditi yakni minimal D3. “Tetapi kemudian saya berpikir, dari kuliah D3 lebih baik saya ambil S1. Maka di tahun 2008, saya berhasil menggondol gelar sarjana ekonomi dari IPS, jurusan ekonomi pembangunan.”

Berbekal gelar sarjana itu, saya pun di tahun yang sama langsung mengikuti ujian WPB, tambah ayah dari tiga anak ini.

Lebih jauh dituturkan Stephen, bisnis investasi perdagangan berjangka di wilayah Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, cukup kompetitif. Buktinya, nyaris seluruh perusahaan pialang berjangka memiliki kantor cabang di Surabaya. Sebab itu, dalam memperkenalkan instrumen investasi ini, perusahaan pialang dituntut kreatif dan inovatif.

Salah satu program pengenalan dan edukasi instrumen investasi perdagangan berjangka yang dikembangkan PT Agrodana yakni membuka pojok bursa di perguruan tinggi.

“Tahun 2012 lalu, kami sudah membuka pojok bursa berjangka di Univ. Surabaya. Pojok bursa itu dikerjasamakan dengan bursa berjangka Jakarta Futures Exchange- JFX. Dalam waktu dekat pun, kami dan JFX juga merencanakan membuka pojok bursa di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang,” jelas pria kelahiran Surabaya, September 1976, ini.

Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk membuka pojok bursa merupakan salah satu cara efektif mengenalkan instrumen investasi perdagangan berjangka komoditi. Dengan demikian diharapkan kalangan civitas perguruan tinggi dapat berkontribusi pada pengembangan industri ini di masa mendatang. Setidaknya, tambah suami dari Siane, ini, mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan memiliki gambaran terhadap bidang kerja yang akan ditujunya.

“Saya cukup yakin ‘kok, lapangan kerja formal yang ada tidak akan mampu menampung semua lulusan perguruan tinggi. Tetapi dengan mengenal instrumen investasi perdagangan berjangka sejak dini, setelah selesai kuliah mereka punya pilihan untuk masa depannya,” kata Stephen.

Lebih jauh dikatakannya, lulusan perguruan tinggi bisa saja menjadi tenaga ahli analisis perusahaan pialang. Atau bahkan mengelola dana yang ada menjadi investor dengan bertransaksi kontrak berjangka komoditi.

Diutarakan ayah dari Chatherine, Willian dan Fiona, ini, berkarier di perusahaan pialang- PT Agrodana Futures, sudah cukup membuatnya nyaman. Dan untuk saat ini, dia belum memiliki rencana untuk pindah ke bisnis sektor lain.

“Saya pikir industri ini di masa mendatang akan semakin berkembang. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah dan keberadaan Indonesia sebagai salah satu faktor penting pertumbuhan ekonomi ASEAN, industri perdagangan berjangka sangat ‘lah penting dalam mengelola risiko,” jelasnya.

Memang semua investasi menjanjikan keuntungan besar, tetapi di sisi lain juga memiliki risiko. Sebab itu, kita harus memiliki kemampuan membaca arah pasar.

“Karena itu juga, setiap hari kami di Agrodana menyediakan analisis harian untuk memberi gambaran arah pasar akan bergerak ke mana. Tetapi fasilitas analisis itu tidak mutlak harus diikuti investor, keputusan akhirnya tetap saja ada di tangan investor,” ujar Stephen.

Di sisi lain digambarkan Stephen, profil investor yang memberi kepercayaan kepada PT Agrodana Futures, Cabang Surabaya, adalah investor yang berusia produktif. Sebab itu, umumnya mereka kritis dan minta pelayanan yang memuaskan. “Memang sampai saat ini



transaksi investor di tempat kami masih didominasi transaksi kontrak bilateral. Meski demikian, kami tetap prioritaskan pengenalan kontrak berjangka multilateral. Seperti kontrak berjangka emas yang ada di JFX,” katanya.

“Kalau boleh jujur, saya sudah cukup nyaman berkarier di industri ini. Setidaknya, sampai saat ini saya bisa memiliki waktu bersama keluarga di akhir pekan. Seperti mengunjungi tempat-tempat wisata alam dan kuliner yang banyak di sekitar Kota Surabaya,” ujar Stephen.

Kumpul dengan keluarga itu buat saya sangat menyenangkan, tambahnya. Setelah sepekan menghadapi tekanan kerja dan mengamati pergerakan arah pasar, berkumpul dengan anak-anak membuat saya segar kembali di hari kerja berikutnya.

“Selain kumpul dengan keluarga, saya juga rutin melakukan olah raga renang. Dengan berenang, saya bersama anak-anak bisa menyalurkan hobi dan juga sekaligus wisata,” ujar Yap Stephen Sanjaya. 📌



“Manfaatkan SRG  
dan  
Tingkatkan Kesejahteraan”